

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGASILAN FINAL PADA KPP
PRATAMA MAGELANG TAHUN 2013**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya



Oleh :
ENDAH PRAYOGI
11409134038

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Endah Prayogi

NIM : 11409134038

Program Studi : Akuntansi D3

Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir : “EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK

PENGHASILAN FINAL PADA KPP PRATAMA

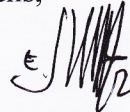
MAGELANG TAHUN 2013”.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini benar-benar hasil kerja saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang tertulis atau diterbitkan orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Juni 2014

Penulis,



Endah Prayogi

11409134038

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PADA
KPP PRATAMA MAGELANG TAHUN 2013**

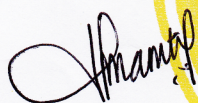
TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan Pembimbing Tugas Akhir

Program Studi Akuntansi Diploma III

Pada Tanggal 18 Juni 2014

Ketua Program Studi,
Akuntansi D III



Amanita Novi Yushita, M.Si.

NIP. 19770810 200604 2 002

Dosen Pembimbing,



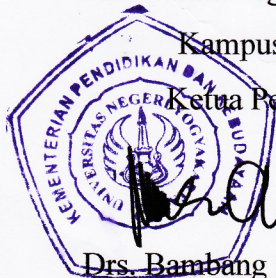
Isro'ah, M.Si.

NIP. 19660704 199203 2 003

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Ketua Pengelola,



Drs. Bambang Saptono, M.Si.

NIP. 19610723 198803 1 001

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PADA KPP PRATAMA MAGELANG TAHUN 2013

Disusun oleh:

Endah Prayogi

11409134038

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi

Akuntansi DIII

Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta

pada tanggal 1 Juli 2014 dan dinyatakan telah memenuhi

syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap

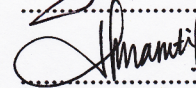
Tanda Tangan

Ketua merangkap anggota

Isroah, M.Si

Sekretaris merangkap anggota

Amanita Novi Y., M.Si.



Yogyakarta, 3 Juli 2014

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Dekan

Ketua Pengelola,



Dr. Sugilarsono, M.Si.

NIP. 19550328/198303 1 002



Bambang Saptono, M.Si.

NIP. 19610723 198803 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan Shalat, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. (Al-Baqarah:153)
- Kebenaran itu adalah dari Tuhan-mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang ragu. (Al-Baqarah:147)
- Bagaimanapun keadaan yang kamu hadapi tetap lakukan yang terbaik.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu dan Ayahku tercinta yang selalu memperjuangkanku, memberikan semangat, dukungan, dan tidak pernah lelah mencurahkan kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi langkahku hingga aku menjadi seorang yang berhasil.
2. Kakakku Dodo Priono yang sangat baik hati dan yang sangat luar biasa mendukungku selama ini.
3. Keluargaku dan Saudaraku yang selalu memberikan semangat agar aku menjadi lebih baik dan mencapai cita-citaku.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PADA KPP PRATAMA MAGELANG TAHUN 2013

Oleh :
ENDAH PRAYOGI
11409134038

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang tahun 2013, (2) Mengetahui hambatan-hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang tahun 2013, (3) Mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Magelang untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final tahun 2013.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yang berlokasi di jalan veteran nomor 20 Magelang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui analisis terhadap isi dari catatan-catatan atau dokumen perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang. Metode wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan penerimaan pajak penghasilan final dalam hal ini adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Pratama Magelang. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif dengan cara membandingkan target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan final, kemudian diukur dengan kriteria efektivitas pajak. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai hambatan dan upaya dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan final.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Penerimaan pajak penghasilan final yang sangat efektif yaitu bulan Juli dengan rasio efektivitas 128,73% dan hanya ada satu bulan penerimaan pajak penghasilan final yang efektif yaitu bulan Oktober dengan rasio efektivitas sebesar 92,33%, sedangkan untuk bulan lainnya rasio efektivitas kurang dari 90%, tingkat efektivitas penerimaan pajak penghasilan final tahun 2013 kurang efektif karena rasio efektivitasnya hanya mencapai 81,69%, (2) Hambatan-hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final yaitu kurangnya petugas yang ahli dalam pajak penghasilan final dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak yang memiliki usaha, (3) Upaya yang dilakukan KPP Pratama Magelang dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan final yaitu meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final KPP Pratama Magelang Tahun 2013”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

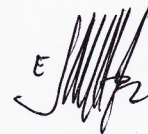
Penulisan tugas akhir tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang banyak membantu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dari permulaan sampai terselesaikannya tugas akhir ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bambang Saptono, M. Si., Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
3. Amanita Novi Yushita, M.Si., Ketua Program Studi Akuntansi D III Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Isroah, M.Si, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta nasehat dalam penyusunan laporan ini.
5. Agustinus Dicky Haryadi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dan seluruh karyawan yang telah memberikan izin dalam pengambilan data dan memberikan bantuan dalam penyusunan Tugas akhir ini.

6. Ibu, Ayah, Keluarga, Saudara dan Sahabat tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan dorongan, semangat, dan bantuan baik moriil maupun materiil, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Semoga ketulusan, pengertian, kesabaran dan keikhlasan semua pihak mendapat rahmat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. Mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 20 Juni 2014
Penyusun



Endah Prayogi
NIM. 11409134038

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Tugas Akhir.....	5
BAB II. KAJIAN TEORI.....	7
A. Deskripsi Teori.....	7
1. Definisi Pajak.....	7

a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Pengelompokan Pajak.....	11
d. Cara Pemungutan Pajak.....	12
2. Definisi Pajak Penghasilan.....	13
a. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi.....	13
b. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	13
1) Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2) Objek Pajak Penghasilan.....	15
3. Penerimaan Pajak	15
4. Pajak Penghasilan Final.....	15
a. PPh atas Penghasilan Bunga Deposito, Tabungan/Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).....	16
b. Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.....	19
c. Penghasilan Berupa Bunga dan Diskonto Obligasi yang Dijual di Pasar Modal.....	19
d. PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayar kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.....	21
e. Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Hadiah dan Undian.....	21

f. Penghasilan Modal ventura dari Transaksi Penjualan Saham/Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Pasangan Usahanya.....	22
g. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan.....	23
h. PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.....	24
i. Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	25
j. Usaha Jasa Konstuksi.....	26
k. Penghasilan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.....	28
5. Efektivitas Penerimaan Pajak	30
a. Pengertian Efektivitas.....	30
b. Ukuran Efektivitas.....	32
B. Kerangka Berfikir.....	32
C. Pertanyaan Penelitian.....	34
BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
A. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
B. Waktu dan Lokasi penelitian.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Data Umum.....	37
a. Sejarah dan Perkembangan	37
b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang	38
c. Tugas pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang	41
d. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.....	42
e. Sumber Daya Manusia.....	43
f. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang	44
2. Data Khusus.....	45
a. Efektivitas Pajak Penghasilan Final Tahun 2013.....	45
b. Hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam Penerimaan Pajak penghasilan Final.....	46
c. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Final.....	47

B. Pembahasan.....	48
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kriteria Efektivitas Pajak.....	36
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Final Tahun 2013.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat balasan Ijin Penelitian dari KPP Pratama Magelang.....	55
2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak penghasilan Final pada KPP Pratama Magelang Tahun 2013.....	56
3. Formulir SPT PPh Pasal 4 Ayat 2.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan oleh negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Setiap tahun pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi sebagai kebijakan keuangan dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang diantisipasi dalam tahun berikutnya. Unsur pendapatan yang paling utama adalah pendapatan yang berasal dari pajak.

Pajak menurut Rochmat Soemitro, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak secara umum digolongkan menjadi beberapa, pertama pajak penghasilan yang merupakan pajak atas penghasilan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang sudah terdaftar sebagai badan usaha kena pajak, kedua yaitu pajak pertambahan nilai yang merupakan pajak atas konsumsi barang dalam negeri, ketiga pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan dan lembaga pemungut dari setiap pajak berbeda sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk pajak penghasilan baik penghasilan pribadi maupun badan dipungut dan dikelola oleh kantor pelayanan pajak pratama di setiap kota/kabupaten.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan instansi yang secara langsung memungut pajak. Penerimaan pajaknya meliputi pajak penghasilan baik penghasilan orang pribadi maupun badan, pajak penghasilan final, pajak pertambahan nilai dan bea materai. Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya bersifat final dan tidak dikurangkan dengan total pajak terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan final ini menganut pada Pasal 4 ayat 2 undang-undang perpajakan.

Peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan final tersebut masih dikaji dan selalu dilakukan pembaruan. Hal ini ditandai dengan adanya penerbitan peraturan baru tentang pajak penghasilan final yaitu Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013. Peraturan ini menetapkan perbedaan pengenaan pajak penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Perbedaanannya didasarkan atas peredaran bruto yang diterima oleh pengusaha, yaitu untuk yang peredaran brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan dikenakan pajak 1% namun apabila peredaran brutonya lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) akan tetap dikenakan pajak dengan menggunakan perhitungan akuntansi biasa atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Dengan adanya tambahan penerimaan pajak penghasilan final yang diberlakukan ditengah tahun anggaran maka banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang mekanisme penerimaan pajak tersebut. Selain itu, sosialisasi tentang peraturan penerimaan pajak penghasilan final juga masih kurang. Pengetahuan tentang mekanisme penerimaan pajak yang masih kurang tersebut menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan final.

Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta mampu mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan final sesuai dengan potensi yang dimiliki. Padahal untuk saat ini sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemungut masih terbatas. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGASILAN FINAL PADA KPP PRATAMA MAGELANG TAHUN 2013”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Kurangnya tenaga ahli dalam pemungutan pajak penghasilan final.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemungutan pajak penghasilan final yang terbaru.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan final.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan dan lebih terfokus, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini dibatasi mengenai Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final pada KPP Pratama Magelang Tahun 2013.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis menemukan permasalahan yang timbul yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Penghasilan Final pada KPP Pratama Magelang tahun 2013?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang tahun 2013?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Magelang untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final tahun 2013?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penyusunan Tugas akhir ini adalah:

1. Mengetahui tingkat efektifitas penerimaan Pajak Penghasilan Final pada KPP Pratama Magelang tahun 2013.
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang tahun 2013.

3. Mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Magelang untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final tahun 2013.

F. Manfaat Tugas Akhir

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan ada manfaat yang didapatkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan yang membutuhkan informasi tentang Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang efektivitas penerimaan pajak setelah terjadi pergantian peraturan, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu yang bermanfaat khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

- 2) Dapat menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah.

b. Bagi Kantor

Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan final.

c. Bagi Universitas

Menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan dan sebagai acuan bagi mahasiswa lain dalam pembuatan penelitian yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Definisi Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Penerimaan pajak sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan fasilitas yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak mempunyai kontribusi yang tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir penerimaan dari sektor fiskal lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Pajak juga merupakan penerimaan negara yang paling utama, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional.

Dibawah ini merupakan definisi pajak sebagai berikut :

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1)

Pajak menurut S. I. Djajadiningrat adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan dukungan tertentu tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2013:1)

Menurut Waluyo (2011:4) pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah (Mardiasmo, 2011)

1) Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, dalam hal ini pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara/pemerintah dengan warganya/rakyatnya

dimana negara mengambil kekayaan dari masyarakat dan dikembalikan ke masyarakat secara tidak langsung. Undang-Undang Pajak dibuat dengan tujuan sebagai aturan dasar pemungutan pajak, sehingga pemungutan pajak berdasarkan atas kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam memungut pajak dan supaya masyarakat juga tidak semauanya untuk membayar pajak.

3) Dapat dipaksakan.

Ciri pajak dapat dipaksakan adalah bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, salah satunya dengan menggunakan media surat paksa, bila perlu ditindak atau dikenai sanksi apabila melakukan perlawanan.

4) Tiada mendapat kontra prestasi atau timbal balik secara langsung.

Tujuannya untuk membedakan antara pajak dan retribusi. Pembayar pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang di bayar.

5) Membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

Dalam negara terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pajak merupakan salah satu penyokong utama dalam penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah, jadi atas pendapatan dari

pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja akan tetapi juga oleh rakyat pada umumnya.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011) yaitu :

- 1) Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, yaitu :
 - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
 - b) Pajak progresif dikenakan atas pajak penghasilan.
 - c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%.
 - d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain.
 - e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi.
 - f) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri jadi kontribusi terhadap pembangunan

juga cukup besar, maka tidaklah heran pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak, tentunya semua sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur pajak yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak maka bisa mendorong tingkat investasi.

c. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi beberapa karakter, sebagaimana diungkapkan oleh Waluyo (2011:8) adalah :

1) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut Pemungutannya

a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

d. Cara Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan (Mardiasmo, 2011) yaitu :

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus diabayar.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

2. Definisi Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Siti Resmi, 2013:169).

b. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

1) Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2013:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh

penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Menurut Waluyo (2011:42) Subjek Pajak meliputi :

a) Orang Pribadi

Subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri.

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris atau bisa disebut juga dengan warisan dianggap subjek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh waris tersebut dan apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

c) Badan

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.

d) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2) Objek pajak penghasilan

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, dimana yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Menurut Siti Resmi (2013:80) Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

3. Penerimaan Pajak

Menurut Peraturan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

4. Pajak Penghasilan Final

Menurut Siti Resmi (2013:145) pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Pajak penghasilan final menurut undang-undang perpajakan pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh karena pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima/diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh si pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

Menurut Hasanudin (2013:211) Penghasilan yang termasuk dalam perhitungan pajak penghasilan final adalah sebagai berikut:

a. PPh atas Penghasilan Bunga Deposito, Tabungan/Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

1) Pengertian Bunga Deposito dan Bunga Tabungan.

Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call* baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketentuan ini berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak.

2) Pemotong

Bank dan Bank Indonesia

Dana pensiun dan Bank yang menjual kembali SBI kepada pihak lain bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang tidak ada persetujuan menteri Keuangan.

3) Tarif

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap

- b) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, terhadap Wajib pajak luar negeri.

4) Pengecualian Pengenaan Pemotongan Pajak

Beberapa penghasilan yang berkaitan dengan deposito yang tidak dikenakan pajak penghasilan antara lain:

- a) Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
- b) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- c) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari Kekayaan Dana pension (Pasal 29 UU No. 11 Tahun 1992) yaitu: iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi dan pengalihan dari dana pension lain.
- d) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Pengecualian dari pemotongan pajak penghasilan dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI, yang diterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.

b. Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

1) Tarif

Besarnya pajak Penghasilan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

- a) Satu per seribu (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan untuk semua transaksi penjualan saham.
- b) Tambahan 0,5% dari nilai jual saham, untuk transaksi penjualan saham pendiri.

c. Penghasilan Berupa Bunga dan Diskonto Obligasi yang Dijual di Pasar Modal.

Obligasi adalah surat utang dan surat utang Negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

1) Tarif

Besarnya pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang dijual di pasar modal adalah sebagai berikut:

- a) Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi.
- b) Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- c) Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
- d) Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan sebesar:

0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010

5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

2) Pemotongan PPh atas Bunga Obligasi

- a) Emiten atau kustodian atas penghasilan bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
- b) Perusahaan efek – dealer – bank selaku pedagang perantara atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat terjadi transaksi.

d. PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayar kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

1) Tarif

Besarnya pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayar kepada anggota koperasi orang pribadi adalah:

- a) 0% untuk penghasilan bunga simpanan samapai dengan Rp240.000,00 per bulan.
- b) 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 per bulan.
- c) Pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan

e. Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Hadiah dan Undian.

1) Pengertian hadiah dan Penghargaan

- a) Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.

b) Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.

c) Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan pajak penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

2) Tarif

Atas hadiah undian dikenakan pajak penghasilan sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.

f. Penghasilan Modal ventura dari Transaksi Penjualan Saham/Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Pasangan Usahanya

1) Pengertian

Perusahaan modal ventura merupakan sarana dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan dan untuk lebih meningkatkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan melakukan penyertaan modalnya pada perusahaan pasangan usaha khususnya yang merupakan usaha kecil dan menengah atau perusahaan yang bergerak

dalam sector tertentu yang mengingat keadaan perekonomiannya perlu memperoleh prioritas untuk dikembangkan.

Perusahaan kecil dan menengah pasangan usaha perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang pada saat perusahaan ventura melakukan penyertaan modalnya penjualan bersih pada tahun pajak sebelumnya tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setahun

2) Tarif

Pengenaan pajak untuk Penghasilan Modal ventura dari transaksi penjualan saham/Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Pasangan Usahanya adalah sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dikenakan dengan syarat:

- a) Pasangan usaha merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang melakukan kegiatan sector usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

g. Pajak penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh

yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. $\text{PPh (Final)} = 10\% \times \text{Bruto}$

- h. PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar PPh Final 5% dari jumlah Bruto Nilai Pengalihan (nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta jual beli/pengalihan dan NJOP tanah & bangunan sesuai SPPT PBB). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan terutang yang bersifat final sebesar 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar kegiatan usaha pokoknya, diwajibkan menyetor PPh 5% melalui bank persepsi. Setoran PPh tersebut tidak bersifat final, sehingga merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 UU PPh. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dihitung dan dilaksanakan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 25. Tarif pengenaannya adalah sebesar:

$$\text{PPh (Final)} = 5\% \times \text{Bruto}.$$

i. Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

1) Pengertian

Dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2) Tarif

Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto.

j. Usaha Jasa Konstruksi

1) Pengertian

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta perlengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta modal penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan

diserahterimakan. Penyediaan jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

2) Tarif

- a) 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang memiliki Kualifikasi usaha kecil; PPh (Final) = 2% x Jumlah Jasa.
- b) 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang memiliki Kualifikasi usaha; PPh (Final) = 4% x Jumlah Jasa.
- c) 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa selain Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka 2; PPh (Final) = 3% x Jumlah Jasa.
- d) 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang dimiliki kualifikasi usaha; dan PPh (Final) = 4% x Jumlah Jasa.
- e) 6% (enam persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. PPh (Final) = 6% x Jumlah Jasa Pajak Penghasilan jasa konstruksi: dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Penggunaan Jasa merupakan

pemotongan pajak; atau disetor sendiri oleh Penyediaan Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

k. Penghasilan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pengenaan Penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu didasarkan pada Peraturan Pemerintah pasal 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengecualian terhadap pengusaha yang tidak dikenakan PP nomor 46 tahun 2013 yaitu meliputi: pengusaha yang menggunakan sarana prasarana bongkar pasang, warung tenda, pedagang asongan, pedagang keliling. Pengusaha tersebut akan dikenakan PP tarif umum. Subjek pajak yang masuk dalam kategori pengecualian akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU PPh dimana pemerintah berhak menentukan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final, namun pajak tersebut tidak akan melebihi tarif tertinggi PPh orang pribadi (30%). Penentuan tarifnya berdasarkan pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

Pengusaha atau jenis usaha yang termasuk dalam peraturan pajak ini adalah para pelaku usaha dengan penghasilan yang diterima/diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun. Peredaran omset merupakan peredaran omset dari usaha termasuk dari cabang,

serta tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dan pekerjaan bebas.

- 1) Menurut PP Pasal 46 Tahun 2013 Penghasilan Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, dapat dikelompokkan menjadi:
 - a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium.
 - b) Penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
 - c) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
 - d) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.
- 2) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Menurut PP Pasal 46 Tahun 2013 meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
 - c) Olahragawan.

- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f) Agen iklan.
- g) Pengawas atau pengelola proyek.
- h) Perantara.
- i) Petugas penjaja barang dagangan.
- j) Agen asuransi.
- k) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

3) Tarif

Besarnya tarif untuk penghasilan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sebesar 1% dari peredaran bruto perusahaan setiap tahun.

5. Efektivitas Penerimaan Pajak

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Jones dan Pendlebury dalam Abdul Halim (2004:164), adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Ismail Nawawi Uha (2013:192) Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan

di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Ihyahul Ulum (2009:28) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas dalam Penerimaan Pajak dapat diartikan jumlah penerimaan yang sebenarnya dibandingkan dengan anggaran penerimaan yang dicanangkan oleh direktorat jenderal pajak. Efektivitas menggambarkan kemampuan Direktorat jenderal pajak dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kemampuan direktorat jenderal pajak dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan yang semakin baik (Abdul Halim, 2004:135). Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan Pajak Penghasilan badan usaha, maka yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan Pajak penghasilan dapat berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan demikian definisi efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Ihyahul Ulum (2009:28) efektivitas diukur dengan melihat apakah suatu program atau suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Kerangka Berfikir

Penerimaan pajak yang selama ini digunakan untuk anggaran dan belanja negara sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah selalu membahas dan menerbitkan peraturan-peraturan baru tentang pajak yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak sehingga

mampu memenuhi anggaran yang telah di susun sebelumnya. Peraturan baru tentang penerimaan pajak ini juga diharapkan mampu meringankan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak taat pajak.

Pajak yang sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak yaitu pajak penghasilan baik penghasilan orang pribadi maupun penghasilan badan usaha. Sekarang ini terdapat penambahan pemungutan pajak untuk pajak penghasilan final dengan diberlakukannya peraturan pemerintah pasal 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan perundang-undnagan yang baru ini menetapkan tentang perbedaan pengenaan pajak penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Perbedaanannya didasarkan atas peredaran bruto yang diterima oleh pengusaha, yaitu untuk yang peredaran brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 akan dikenakan pajak 1% namun apabila peredaran brutonya lebih dari Rp4.800.000.000,00 akan tetap dikenakan pajak dengan menggunakan perhitungan akuntansi biasa.

Dengan adanya tambahan peraturan dalam pemungutan pajak penghasilan final maka instansi pemungut pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayan ini harus didukung dengan sarana prasana ditempat pemungutan sehingga penerimaan pajak juga dapat maksimal.

Pajak penghasilan 1% ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2013 yang lalu, dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final

dari sebelum diberlakukannya peraturan tersebut. Sampai saat ini instansi pemungut sudah memungut pajak 1% selama 6 bulan namun masih belum terlihat peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak penghasilan final. Hal ini terjadi karena pajak penghasilan 1% masih sangat kecil penerimaannya.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Penghasilan Final pada KPP Pratama Magelang tahun 2013?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang tahun 2013?
3. Bagaimana upaya yang KPP Pratama Magelang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan pajak penghasilan final tahun 2013?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seksi Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final pada KPP Pratama Magelang.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian di Jalan Veteran Nomor 20 Magelang.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2014 sampai dengan Juni 2014.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan dokumentasi dan metode wawancara terstruktur. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui analisis terhadap isi dari catatan-catatan atau dokumen perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang. Metode wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan penerimaan pajak penghasilan final dalam hal ini adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Pratama Magelang.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode yang membandingkan target penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan final, kemudian diukur dengan kriteria efektivitas pajak. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai hambatan dan upaya dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan final. Penelitian ini menggunakan analisis rasio sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 1: Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak Efektif

(sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri, 1996)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Sejarah dan Perkembangan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang berlokasi di Jalan Veteran nomor 20 Magelang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia dan termasuk dalam direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang pada intinya sama dengan keberadaan Kantor Pelayanan Pajak lainnya di seluruh Indonesia yang terkait dengan perjalanan sejarah yang dialami bangsa Indonesia. Nama kantor Pelayanan Pajak sendiri berubah-ubah mulai zaman Belanda, zaman penjajah Jepang di Indonesia sampai dengan era globalisasi saat ini.

Semula kantor tersebut bernama Kantor Pelayanan Pajak Magelang kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KPPBB). Tujuan dari

pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah dalam rangka modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan “*Good Governance*” dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektifitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang mulai beroperasi 30 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-141 /PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007. Semua pelayanan perpajakan pusat menjadi satu yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan. Wilayah administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang meliputi Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.

Pada tahun 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mgelang dengan adanya Undang-Undang Pendapatan Retribusi Daerah (UUPDRD) maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang tidak lagi mengurus Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk wilayah Kabupaten Magelang.

b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

1) Visi

Menjadi “Model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan”

2) Misi

a) Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

b) Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang “*Minimizing Distortion*”.

c) Politik

Mendukung proses demokrasi bangsa.

d) Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan : aspirasi masyarakat, teknologi perpajakan dan administrasi perpajakan yang mutakhir.

3) Strategi

a) Fiskal

Meningkatkan penguasaan atas subjek pajak dan objek pajak. Menyempurnakan perundang-undangan perpajakan. Dan Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat

b) Ekonomi

Berkoordinasi dengan instansi terkait, merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan yang mendukung perkembangan perbaikan keunggulan kompetitif Indonesia. Berkoordinasi dengan instansi terkait, merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan yang mendukung perkembangan usaha kelompok kecil. Berkoordinasi dengan instansi terkait, merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang konduktif dan merangsang investor.

c) Politik

Meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah. Membantu penyempurnaan perangkat pengelolaan pendapatan daerah. Meningkatkan peran PPh orang pribadi, PBB dan BOHTB dalam mendukung pengembangan APBD.

d) Kelembagaan

Mengembangkan organisasi DJP sesuai Visi dan mendukung pelaksanaan Misi DJP, kembangkan kualitas SDM yang inovatif dan mampu mendukung pelaksanaan misi dan strategi menuju pencapaian Visi DJP berdasarkan nilai-nilai acuan., tingkatkan secara berkelanjutan kinerja unit kantor, sempurnaan layout

kantor untuk memfasilitasi proses internal dan optimalisasi pelayanan public, peningkatan modernisasi sarana dan prasarana kerja.

4) Nilai Acuan

- a) Profesionalisme yang meliputi integritas, disiplin dan kompeten
- b) Transparansi
- c) Akuntabilitas
- d) Meritokrasi
- e) Kemandirian
- f) Pelayanan prima
- g) Pembelajaran dan pemberdayaan

c. Tugas pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak,
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum pajak,
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,
- 4) Penyuluhan perpajakan,
- 5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,
- 6) Pelaksanaan ekstensifikasi,
- 7) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak,
- 8) Pelaksanaan pemeriksaan pajak,
- 9) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
- 10) Pelaksanaan konsultasi perpajakan,
- 11) Pelaksanaan intensifikasi,
- 12) Pembetulan ketetapan pajak,
- 13) Pelaksanaan administrasi kantor.

d. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

Dalam melaksanakan peran strategisnya, KPP Pratama Magelang memiliki gambaran umum sebagai berikut:

1) Luas Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang memiliki wilayah kerja meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota yakni:

Kota Magelang dengan luas wilayah 18,12
Km²

Kabupaten Magelang dengan luas wilayah 1.085,75
Km²

Jumlah seluruhnya 1.103,87
Km²

e. Sumber Daya Manusia

1) Berdasarkan Unit Eselon

Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang pada tahun 2013 secara keseluruhan mencapai 88 orang, yang terbagi sebagai berikut:

- a) Eselon III : 1 orang
- b) Eselon IV : 10 orang
- c) Fungsional : 9 orang
- d) AR : 27 orang
- e) Pelaksana : 41 orang

2) Berdasarkan Golongan

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang tahun 2013 menurut golongan secara rinci adalah sebagai berikut:

- a) Golongan II : 25 orang

b) Golongan III : 57 orang

c) Golongan IV : 6 orang

3) Berdasarkan Jenis Pendidikan

a) SLTA : 14 orang

b) Diploma I : 9 orang

c) Diploma III : 16 orang

d) Diploma IV/ Sarjana : 34 orang

e) Pasca Sarjana : 15 orang

f. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia KMK.55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan disebutkan bahwa KPP Pratama terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor
- 2) Subbagian Umum
- 3) Seksi Pelayanan
- 4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 5) Seksi Penagihan
- 6) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

- 7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-III
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Data Khusus

Hasil penelitian yang diperoleh dari kantor Pelayanan Pajak Pratama magelang yaitu berupa data sebagai berikut:

a. Efektivitas Pajak Penghasilan Final Tahun 2013

Tabel 2: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Final
Tahun 2013

Bulan	Target	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
Januari	6.406.373.010	4.404.411.291	68,75%	Kurang Efektif
Februari	6.206.970.146	4.617.288.001	74,39%	Kurang Efektif
Maret	6.675.328.493	4.918.997.967	73,69%	Kurang Efektif
April	6.290.044.005	4.809.393.540	76,46%	Kurang Efektif
Mei	6.403.561.888	5.078.611.271	79,31%	Kurang Efektif
Juni	6.298.973.976	5.043.142.275	80,06%	Cukup Efektif
Juli	5.594.223.402	7.201.485.853	128,73%	Sangat Efektif
Agustus	7.280.978.671	6.524.843.815	89,61%	Cukup Efektif
September	6.646.574.145	5.212.521.465	78,42%	Kurang Efektif
Oktober	7.316.139.390	6.755.126.325	92,33%	Efektif
November	9.425.840.678	6.033.258.784	64,01%	Kurang Efektif
Desember	10.707.761.235	9.040.526.703	84,43%	Cukup Efektif
Rata-rata			81,69%	Cukup Efektif

Perhitungan efektivitas berdasarkan target dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan Pajak Penghasilan Final dengan anggaran pemungutan Pajak Penghasilan Final. Pertumbuhan

Pajak Penghasilan Final di kabupaten dari tahun 2013 cukup efektif dan termasuk dalam kategori baik. Walaupun belum dapat mencapai target penerimaan yang ditetapkan.

Setiap bulan pada tahun 2013 secara keseluruhan mengalami peningkatan efektivitas penerimaan pajak penghasilan final ditandai dengan peningkatan efektivitas penerimaan pajak penghasilan dari bulan januari samapi dengan juli. Namun untuk bulan agustus sampai dengan desember efektivitas penerimaan tidak meningkat padahal pada bulan-bulan ini seharusnya efektivitas semakin meningkat karena penerimaan pajak penghasilan sudah ditambah dengan pajak penghasilan 1% dari omset yang memang baru berlaku mulai bulan Juli 2013.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan final dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan pajak Pratama Magelang belum berhasil dalam merealisasikan Pajak penghasilan Final yang telah ditetapkan. KPP Pratama Magelang tidak dapat mengoptimalkan potensi pajak yang ada di wilayah Magelang.

- b. Hambatan-Hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Final antara lain:
 - 1) Keterbatasan petugas yang ahli dalam bidang pajak pnghasilan final.

Sumber daya manusia yang mengerti tentang pengelolaan Pajak Penghasilan final sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak karena dengan semakin banyaknya SDM akan mempermudah pihak KPP dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah dikarenakan Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak terutama untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak baik itu pajak pribadi maupun badan. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak yang dikelola KPP belum efektif sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki.
- c. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Final, antara lain:
- 1) Dengan meningkatkan profesionalisme petugas, yaitu dengan cara:
 - a) Mengadakan Pelatihan seperti diklat dan seminar mengenai pengelolaan Pajak Penghasilan final, diharapkan karyawan dapat membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan mengenai pembayaran pajak penghasilan final dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final setiap tahunnya.

- b) Menumbuhkan motivasi kerja dengan memberikan bimbingan, petunjuk dan bonus bagi petugas pemungut yang mampu mencapai target pemungutan.
- 2) Dengan meningkatkan pengadaan sosialisasi dan penyuluhan dengan cara mendatangi instansi yang terkait dengan wajib pajak orang pribadi yang memiliki badan usaha.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian KPP pratama Magelang di atas dapat diketahui bahwa:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang belum terealisasi secara efektif ditandai dengan beberapa faktor sebagai berikut:.
 - a. Dalam satu tahun 2013 hanya ada satu bulan penerimaan pajak penghasilan final yang sangat efektif yaitu bulan Juli dengan rasio efektivitas 128,73% dan hanya ada satu bulan penerimaan pajak penghasilan final yang efektif yaitu bulan Oktober dengan rasio efektivitas sebesar 92,33%. Sedangkan untuk bulan lainnya rasio efektivitas kurang dari 90%.
 - b. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penghasilan final tahun 2013 kurang efektif karena rasio efektivitasnya hanya mencapai 81,69%.

Persentase efektivitas penerimaan pajak penghasilan final paling tinggi adalah 128,73% yang dicapai pada bulan juli. Untuk

bulan agustus sampai desember penerimaannya masih kurang efektif padahal pada bulan ini sudah diberlakukan peraturan tentang pemungutan pajak 1% dari omset yang seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final. Tingkat efektivitas yang kurang efektif ini apabila dibiarkan dapat menimbulkan tidak tercapainya target penerimaan pajak penghasilan pada tahun berikutnya.

2. Dalam pemungutan pajak penghasilan final pihak KPP Pratama magelang menemukan hambatan. Hambatan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan petugas yang ahli dalam bidang pajak penghasilan final.

Sumber daya manusia yang mengerti tentang pengelolaan Pajak Penghasilan final sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak karena dengan semakin banyaknya SDM akan mempermudah pihak KPP dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

- b. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah dikarenakan Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak terutama untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak baik itu pajak pribadi maupun

badan. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak yang dikelola KPP belum efektif sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki.

3. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan final, antara lain:
 - a. Dengan meningkatkan profesionalisme petugas, yaitu dengan cara:
 - 1) Mengadakan Pelatihan seperti diklat dan seminar mengenai pengelolaan Pajak Penghasilan final, diharapkan karyawan dapat membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan mengenai pembayaran pajak penghasilan final dan selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final setiap tahunnya.
 - 2) Menumbuhkan motivasi kerja dengan memberikan bimbingan, petunjuk dan bonus bagi petugas pemungut yang mampu mencapai target pemungutan.
 - b. Dengan meningkatkan pengadaan sosialisasi dan penyuluhan dengan cara mendatangi instansi yang terkait dengan wajib pajak orang pribadi yang memiliki badan usaha.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian KPP Pratama Magelang di atas dapat diketahui bahwa:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang belum terealisasi secara efektif ditandai dengan beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Dalam satu tahun 2013 hanya ada satu bulan penerimaan pajak penghasilan final yang sangat efektif yaitu bulan Juli dengan rasio efektivitas 128,73% dan hanya ada satu bulan penerimaan pajak penghasilan final yang efektif yaitu bulan Oktober dengan rasio efektivitas sebesar 92,33%. Sedangkan untuk bulan lainnya rasio efektivitas kurang dari 90%.
 - b. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penghasilan final tahun 2013 kurang efektif karena rasio efektivitasnya hanya mencapai 81,69%.
2. Hambatan pihak KPP Pratama Magelang dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Final.
 - a. Keterbatasan petugas yang ahli dalam bidang pajak penghasilan final.
 - b. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak terutama untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha.

4. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Prtama Magelang dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan final, antara lain:
 - a. Dengan meningkatkan profesionalisme petugas.
 - b. Dengan meningkatkan pengadaan sosialisasi dan penyuluhan dengan cara mendatangi instansi yang terkait dengan wajib pajak orang pribadi yang memiliki badan usaha.

B. Saran

Adapun saran sebagai alternatif pemecahan masalah yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang lebih meningkatkan sosialisasi mengenai penerimaan pajak penghasilan final kepada wajib pajak sehingga diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang menerbitkan surat tagihan terhadap wajib pajak yang belum membayar pajaknya pada setiap penerimaan penghasilan kena pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang hendaknya mendata wajib pajak penghasilan final yang tidak patuh membayar pajak serta memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP APM YKPN.
- Hasanuddin Tatang. (2013). *PPH Pemotongan/Pemungutan*. Surabaya. Dbuku.
- Ilhayul Ulum. (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail Nawawi Uha. (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offise.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah pasal 46 tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu*. Jakarta
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*. Jakarta
- Siti Resmi. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG

JALAN VETERAN NO. 20 MAGELANG
 TELEPON (0293) 362280; FAKSIMILE (0293) 364417
 HOME PAGE : <http://www.pajak.go.id>

Nomor : S-4871 /WPJ.32/KP.04/2014
 Sifat : Biasa
 Hal : Pemberian Ijin Survei

30 April 2014

Yth. Ketua Pengelola Program Studi D-3 Akuntansi
 Universitas Negeri Yogyakarta
 Jalan Bhayangkara No. 7
 Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 298/UN34.38/DT/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Izin Survei Tugas Akhir atas:

Nama : Endah Prayogi
 Nomor Induk Mahasiswa : 11409134038

dengan ini KPP Pratama Magelang memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data pada KPP Pratama Magelang sesuai dengan masalah yang akan dikaji dalam laporan tugas akhir, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang dapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor

Agustinus Dicky Haryadi
 NIP 196808031993101001


Kp : KP.04/KP.0401



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG

LAPORAN EVALUASI PENERIMAAN PAJAK
Tahun 2013

No.	Bulan	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan
1	Januari	Rp6,406,373,010.00	Rp4,404,411,291.00
2	Februari	Rp6,206,970,146.00	Rp4,617,288,001.00
3	Maret	Rp6,675,328,493.00	Rp4,918,997,967.00
4	April	Rp6,290,044,005.00	Rp4,809,393,540.00
5	Mei	Rp6,403,561,888.00	Rp5,078,611,271.00
6	Juni	Rp6,298,973,976.00	Rp5,043,142,275.00
7	Juli	Rp5,594,223,402.00	Rp7,201,485,853.00
8	Agustus	Rp7,280,978,671.00	Rp6,524,843,815.00
9	September	Rp6,646,574,145.00	Rp5,212,521,465.00
10	Oktober	Rp7,316,139,390.00	Rp6,755,126,325.00
11	November	Rp9,425,840,678.00	Rp6,033,258,784.00
12	Desember	Rp10,707,761,235.00	Rp9,040,526,703.00
Jumlah		Rp85,252,769,039.00	Rp69,639,607,290.00

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan /Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
2. Nama :	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
3. Alamat :	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/Dipungut/Di setor Sendiri (Rp)
	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/416			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH				

Terbilang :

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div>	lembar
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).		
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2):	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div>	lembar
4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi Oleh Petugas SPT Masa diterima : <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK Nama <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> NPWP <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	Tanggal <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> tanggal bulan tahun		
Tanda tangan & Cap	Tanggal <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> tanggal bulan tahun		
Tanda tangan		Tanda tangan	

F.1.1.32.04

Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009